

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi yang dikaji berdasarkan faktor kesuksesan suatu pelaksanaan kebijakan diantaranya yaitu:

1. Komunikasi

Program pengurangan penggunaan kantong plastik kurang dikomunikasikan dengan baik kepada kelompok sasaran terutama masyarakat. Adapun proses komunikasi, upaya dan strategi komunikasi yang ditargetkan kepada implementor maupun kelompok sasaran kebijakan, melalui pemanfaatan beragam media komunikasi baik visual dan audiovisual dengan cara konvensional dan modern. Bahkan adanya beberapa pengusaha terutama waralaba toko ritel modern yang telah menggunakan kantong dan tas ramah lingkungan. Akan tetapi, adanya kekurangan berupa ketidakjelasan dan inkonsistensi melalui sosialisasi kebijakan yang tidak menyasar kepada semua pihak terkait atau belum masif dan maksimal sehingga mereka masih bebas menggunakan kantong plastik, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan, pengusaha toko kelontong rumahan, maupun pasar tradisional. Juga adanya respon dari sebagian besar masyarakat yang

underestimate dan tidak yakin bahwa kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik dapat berhasil untuk diwujudkan dengan signifikan.

2. Sumber Daya

Program pengurangan penggunaan kantong plastik masih kurang dan tidak memiliki sumber daya yang memadai. Hal ini dikarenakan jumlah staf yang dimiliki masih kurang dan tidak memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik. Kemudian fasilitas masih kurang lengkap. Namun, patut diapresiasi bagi implementor dari segi informasi telah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta menggunakan media ataupun cara komunikasi baik visual maupun audiovisual dan konvensional maupun modern untuk mensosialisasikan kebijakan. Dari segi kewenangan, didapati bahwa kehadiran UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang pada DLH Kabupaten Bekasi.

3. Disposisi

Komitmen yang ditunjukkan implementor kebijakan yaitu Pemerintah Kabupaten Bekasi terkhususnya DLH sangat baik melalui pemahaman, sikap dan perilaku dalam mengarahkan, dan responsivitas telah baik. Walaupun begitu, masih dapat dinilai bahwa implementor belumlah adil, tegas, dan konsisten. Dikarenakan tidak semua kelompok sasaran, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan, maupun pengusaha toko kelontong rumahan dan pasar tradisional yang masih dengan bebas menggunakan kantong plastik yang jelas tidak ramah lingkungan. Keadaan

berbeda ditunjukkan oleh komitmen dari kebanyakan kelompok sasaran terutama masyarakat melalui pemahaman, sikap dan perilaku dalam mengarahkan, dan responsivitas masih kurang baik akan kehadiran kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Terlebih mereka merespon hadirnya kebijakan ini dengan *underestimate* dan tidak yakin dapat berhasil diwujudkan dengan signifikan dan optimal.

4. Struktur Birokrasi

Faktor struktur birokrasi pihak instansi dan OPD yang ada di Kabupaten Bekasi dalam proses implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik sudah memiliki alur struktur organisasi yang cukup jelas berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab (fragmentasi). Bahkan Pemerintah Kabupaten Bekasi termasuk DLH berinisiatif untuk membentuk Satgas Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup (PPLH) yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menangani masalah sampah dan pencemaran lingkungan. Akan tetapi, masih ditemukan kekurangan dan hambatan terkait alur struktur organisasi berkenaan fragmentasi dan SOP yang sebenarnya terselesaikan melalui upaya untuk mempercepat pembentukan Satgas Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup (PPLH).

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi telah dilakukan dengan baik tetapi masih banyak yang tidak tepat sasaran dikarenakan masih

banyaknya masyarakat dan para pemilik toko kelontong yang masih menggunakan kantong plastik dalam kegiatan sehari-hari.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, bentuk kontribusi pada penelitian ini yaitu dalam bentuk saran. Adapun hal yang akan menjadi saran berkaitan dengan implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi yaitu:

1. Mempercepat pembentukan Satgas Penanganan Permasalahan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Bekasi melalui SK, mengingat masalah sampah dan pelestarian lingkungan menjadi isu holistik dan kompleks yang membutuhkan tanggung jawab bersama.
2. Diperlukannya peningkatan sumber daya yang memadai dan mumpuni terutama berkaitan dengan jumlah SDM beserta kemampuan dan keterampilan yang dimiliki juga fasilitas guna menunjang peningkatan keberhasilan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik.
3. Implementor kebijakan yaitu Pemerintah Kabupaten Bekasi terutama DLH harus memberikan kejelasan dan konsistensi melalui sosialisasi kebijakan yang menyasar kepada semua pihak terkait dengan masif dan maksimal melalui peningkatan inovasi, sehingga meningkatkan kesadaran semua pihak agar ikut menjadi bagian dalam mengurangi sampah plastik dan menjaga kelestarian lingkungan.

4. Seluruh kelompok sasaran dari kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kabupaten Bekasi, terutama masyarakat harus terlibat dan berperan aktif untuk terus menjaga lingkungan terlebih masih banyak ditemukan masyarakat yang menggunakan kantong plastik.
5. Diterapkannya Standard Operasional Prosedur (SOP) secara teknis dengan baik dan benar dengan cara pembinaan dan pengawasan yang dimana hal ini berupa sosialisasi secara terus menerus, diadakanya konsultasi, serta memberikan teguran secara lisan atau teguran berupa surat. Agar masyarakat dan para pelaku usaha dapat menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik ini secara maksimal.